

## ABSTRAK

### **Implementasi Kekuatan Eksekutorial Terhadap Hak Tanggungan Dalam Rangka Penyelesaian Kredit Macet Berdasarkan Akta Yang Telah Dibuat Oleh Notaris**

Hak tanggungan merupakan salah satu jaminan dalam perjanjian kredit, yang mana pembebanan hak tanggungan dilaksanakan oleh notaris atau PPAT sebagai pejabat yang berwenang, dengan dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan atau Surat Kuasa Atas Pembebanan Hak Tanggungan dan didaftarkan pada kantor pertanahan setempat. Apabila terjadi kredit macet, hak tanggungan dilakukan eksekusi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis implementasi kekuatan eksekutorial terhadap hak tanggungan dalam rangka penyelesaian kredit macet berdasarkan akta yang telah dibuat oleh notaris dan untuk mengkaji dan menganalisis hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian kredit macet serta untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian kredit di masa yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian bersifat *diskriptif* yang dari penelitian memusatkan perhatian kepada masalah-masalah *actual* yang kemudian dianalisa. Metode pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan atau data sekunder yang diperoleh dari pihak-pihak terkait. Analisis permasalahan menggunakan analisis kualitatif, data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi kekuatan eksekutorial terhadap hak tanggungan dalam rangka penyelesaian kredit macet berdasarkan akta yang dibuat oleh notaris adalah belum tentu mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (2) Hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian kredit macet dengan adanya itikad tidak baik dari debitur dan debitur mengalami masalah ekonomi yang tidak sanggup membayar hutang-hutangnya. (3) Penyelesaian kredit macet di masa yang akan datang harus tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan peraturan lainnya yang berlaku.

Saran : Harus diadakan suatu informasi riwayat kredit yang dimiliki oleh Bank Indonesia untuk dapat mengetahui dan menganalisis karakter keuangan debitur secara lebih mendalam.

**Kata kunci** : Kekuatan eksekutorial, hak tanggungan

## ABSTRACT

### **Implementation of the Executorial Strength on the Deposit Rights in the Framework of Credit Jam Settlement Based on the Deed Created by Notary**

The mortgage is one of the guarantees in the credit agreement, in which the imposition of the mortgage is executed by a notary or PPAT as an authorized official, by a Deed of Assignment or a Power of Attorney for the Deposit Insurance and registered to the local land office. In the event of non-performing loans, the right of liability shall be executed in accordance with the provisions of Law Number 4 of 1996 concerning the Right of Dependence on the Land and Related Items.

The purpose of this study is to examine and analyze the implementation of the execution power of mortgages in the context of settlement of non-performing loans based on the deeds that have been made by the notary and to examine and analyze the barriers that occur in the process of settlement of bad debts and to review and analyze the completion of credit in the future come.

The research method used is sociological juridical method with descriptive research specification which from research focusing attention to actual problems which then analyzed. Methods of data collection by library research or secondary data obtained from related parties. Problem analysis using qualitative analysis, data obtained through field research and literature.

The result of the research shows that (1) Implementation of executorial force to mortgage right in the framework of settlement of bad credit based on deed made by a notary is have a fixed legal force. (2) Barriers that occur in the process of settlement of bad debts in the presence of bad faith from debtors and debtors experiencing economic problems that are not able to pay its debts. (3) The settlement of future non-performing loans shall continue to refer to Law Number 10 of 1998 concerning Amendment to Act Number 7 of 1992 concerning Banking and other applicable regulations.

Suggestion: There should be a credit history information held by Bank Indonesia to be able to know and analyze the debtor's financial character more deeply.

Keywords: The power of executorial, Mortgage